



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN TAHUNAN

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN ACEH

2024



KATA PENGANTAR

Selama kurun waktu 2024, Stasiun KIPM Aceh sebagai salah satu UPT yang mendukung Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Kelautan dan Hasil Perikanan (BPPMHKP) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pengendalian mutu hasil kelautan dan perikanan.



Dalam rangka memenuhi pertanggung jawaban kepada Kepala BPPMHKP serta memberikan informasi kepada unit kerja lainnya maka penyusunan laporan tahunan 2024 Stasiun KIPM Aceh diharapkan dapat memberikan gambaran kegiatan, tantangan serta tindak lanjut sebagai upaya pemecahan permasalahan yang ada.

Dengan semangat *#2025KKPRiseTogether*, seluruh jajaran KKP, termasuk Stasiun KIPM Aceh optimis dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik di Tahun 2025 untuk mengedepankan kolaborasi dan sinergi memajukan sektor kelautan dan perikanan serta dengan memegang teguh prinsip Ekonomi Biru.

Atas nama Stasiun KIPM Aceh, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini. semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 8 Januari 2025

Kepala Stasiun KIPM Aceh



Diky Agung Setiawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

02

PROFIL UPT

Visi	13
Misi	13
Tujuan Organisasi	13
Sasaran Organisasi	14
Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi	14

04

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja	47
Kinerja anggaran	48

01

PENDAHULUAN

latar belakang	10
arah kebijakan isu strategis	10
sistematika penyajian	11
tujuan laporan	11

03

KEGIATAN SKIPM ACEH

Kegiatan Tim Kerja Pengendalian dan pengawasan mutu KHP	19
Kegiatan Tim Kerja Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan KHP	29
Kegiatan Tim Kerja tata kelola pemerintahan yang baik	31

05

PENUTUP

Kesimpulan	51
------------	----

06

LAMPIRAN

52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pegawai Skipm Aceh Tahun 2024	15
Tabel 2. Sertifikasi CPIB Kapal Tahun 2024	18
Tabel 3. Data Ruang Lingkup Produk Perikanan Yang dijamin sertifikasi sistem HACCP (Produk) Skipm Aceh Tahun 2024	20
Tabel 4. Data permohonan sertifikasi kelayakan produk Skipm Aceh	20
Tabel 5. Data sertifikasi kelayakan produk (SKP)	21
Tabel 6. Data sertifikasi ekspor hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan	26
Tabel 7. Data lalulintas Skipm Aceh	26
Tabel 8. Jumlah media pembawa komoditi ekspor hidup tahun 2024	26
Tabel 9. Jumlah media pembawa komoditi ekspon non hidup tahun 2024	26
Tabel 10. Hasil Penilaian pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup BPPMHKP	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi	10
Gambar 2. Jumlah dan Tingkat Pendidikan pegawai Skipm Aceh	15
Gambar 3. Survei Kepuasan Masyarakat	15
Gambar 4. Layanan umum Skipm Aceh Tahun 2024	17
Gambar 5. Layanan Keuangan Skipm Aceh Tahun 2024	17
Gambar 6. Kegiatan Sertifikasi CPIB kapal	19
Gambar 7. Inspeksi dan monitoring penerapan HACCP di UPI	21
Gambar 8. Kegiatan pengawasan domestik	23
Gambar 9. Kegiatan pengambilan sampel marine biotoksin	25
Gambar 10. Grafik Lalulintas berdasarkan frekuensi	26
Gambar 11. Kegiatan pengawasan produk perikanan ekspor	28
Gambar 12. Kegiatan Re-Akreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012	29
Gambar 13. Publikasi Survei Kepuasan Masyarakat Skipm Aceh	31
Gambar 14. Capture Nilai IP ASN	32
Gambar 15. Penandatanganan kerja sama antara BPPMHKP dengan Pos Indonesia	36
Gambar 16. Dokumentasi soft launching aplikasi aquafiscom	37
Gambar 17. Dokumentasi sosialisasi budaya pelayanan prima	38
Gambar 18. Kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG)	39
Gambar 19. Perhargaan Keterbukaan Informasi Publik KKP	40
Gambar 20. Kegiatan Bersih Pantai	41
Gambar 21. Pembagian Susu Ikan dalam rangka HUT KKP	42
Gambar 22. Capture capaian kinerja dalam aplikasi Kinerja tahun 2024	44
Gambar 23. Komposisi pagu dan detail realisasi tahun 2024	45
Gambar 24. Komposisi alokasi, relaisasi nilai kinerja dan partisipasi satuan kerja	45
Gambar 25. Capture nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) pada aplikasi OMSPAN	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. PK BPPMHKP dengan SKIPM Aceh tahun 2024

49

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum, SKIPM Aceh telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan tahun 2024. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja (IK) yang telah ditetapkan.

Pada periode triwulan IV terdapat perubahan dokumen perjanjian kinerja SKIPM Aceh berdasarkan *cascading* kinerja unit eselon I BPPMHKP. Hal ini sesuai dengan perubahan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yang terdiri atas :

1. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Pusat Manajemen Mutu;
3. Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer;
4. Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen;
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Dari seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kerja SKIPM Aceh tahun 2024, seluruhnya memenuhi dan melebihi target yang telah ditetapkan. Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) SKIPM Aceh hingga akhir tahun 2024 adalah sebesar 114,61 %. Berdasarkan hasil pengukuran melalui aplikasi kinerjaku dengan sasaran strategis sebanyak 3 sasaran dan terdiri dari 15 indikator kinerja masuk dalam kategori istimewa (berwarna biru). Dari seluruh indikator kinerja yang dimiliki telah tercapai sesuai dengan target dan atau melebihi target yang ditetapkan, dengan perhitungan nilai posisi akhir.

Realisasi anggaran Stasiun KIPM Aceh sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp. 5.088.935.747,- atau mencapai 99.91 % dari alokasi anggaran tersedia sebesar Rp. 5.093.642.000,. Realisasi anggaran tersebut dilaksanakan pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen.



BAB 1

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan visi Presiden republik Indonesia yaitu “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”, salah satu misi yang diemban oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia adalah Struktur Ekonomi yang Produktif dan berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional. Sebagai dukungan terhadap visi dan misi tersebut, visi Badan pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong.

BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara transparan, akuntabel bertanggungjawab, independen, dan kewajaran sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan salah satu unit eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. UPT BPPMHKP pasca reorganisasi mendapat perintah untuk mengemban tugas dan fungsi pengendalian serta pengawasan mutu sesuai Surat Perintah Kepala BPPMHKP Nomor B.1161/BPPMHKP/KP.440/IX/2024 tanggal 27 September 2024; Dalam hal organisasi dan tatalaksana, pada

Tahun 2025 akan dilakukan akselerasi Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BPPMHKP melalui pengusulan ke Kementerian PANRB hingga progres penetapannya yang berimplikasi kepada pengajuan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) lingkup BPPMHKP.

ARAH KEBIJAKAN ISU STRATEGIS

Arah kebijakan dan strategi pembangunan SKIPM Aceh disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran BPPMHKP, maka strategi SKIPM Aceh adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan Aceh dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
2. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
3. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data.

Dengan motto **‘BEUTARI’**, Bersahaja Efektif Unggul Transparan Akuntabel Ramah dan Inovatif SKIPM Aceh akan menjadi garda terdepan untuk menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan hulu – hilir .

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan Penyajian Laporan tahunan tahun 2024 ini merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut :

- BAB I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
- BAB II - Profil UPT, menyajikan penjelasan tentang visi dan misi serta tujuan dan sasaran organisasi.
- BAB III - Kegiatan SKIPM Aceh, menyajikan kegiatan yang telah dilaksanakan pada masing-masing bidang kerja.
- BAB IV - Akuntabilitas Kinerja, menyajikan tentang capaian kinerja, kinerja anggaran, serta efisiensi pelaksanaan anggaran.
- BAB V - Penutup, menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
- Lampiran

TUJUAN LAPORAN

Adapun tujuan dari pembuatan Laporan Tahunan ini antara lain:

1. Memberikan gambaran tentang visi dan misi, tugas pokok dan fungsi serta tujuan dan sasaran SKIPM Aceh selama Tahun 2024
2. Memberikan gambaran tentang kegiatan administrasi dan keuangan yaitu: Surat menyurat, pengelolaan perlengkapan (inventaris), kegiatan kepegawaian, anggaran pembangunan rutin termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pemanfaatannya.
3. Memberikan gambaran tentang kegiatan operasional yaitu : sosialisasi peraturan perundangan, kerjasama, operasional dan pengelolaan laboratorium, serta layanan Sertifikat Mutu Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP).
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Tahun 2024 secara sistematis dan terarah
5. Mengukur kinerja dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada Tahun 2024
6. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024
7. Sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan kegiatan SKIPM Aceh pada Tahun 2024.



BAB 2

PROFIL UPT

PROFIL UPT



Visi Organisasi

Sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berarti adalah bagian integral dari Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan BPPMHKP maka visi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Aceh tidak terlepas dari idealisme dan cita-cita BPPMHKP. Dengan demikian visi SKIPM Aceh yaitu: “Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman konsumsi dan terpercaya”.

Visi di atas dirumuskan dengan memperhatikan keselarasan dan kesesuaian antara visi dengan tugas fungsi yang diemban oleh SKIPM Aceh. Visi tersebut juga merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari segenap personil yang ada dilingkup SKIPM Aceh. Pencapaian visi Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman konsumsi dan terpercaya harus didukung sumberdaya manusia yang berkualitas dengan menerapkan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Berdasarkan hal tersebut Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh harus memiliki daya tahan yang tinggi terhadap perubahan lingkungan strategis dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan atau permintaan pengguna jasa.

Misi Organisasi

Dalam rangka pencapaian visi seperti yang telah diuraikandi atas maka SKIPM Aceh mengembangkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing hasil kelautan dan perikanan melalui inspeksi, sertifikasi, surveilans, pengambilan contoh uji, pengujian dan monitoring.
2. Meningkatkan penerapan praktik yang baik di setiap rantai pasok dan kepatuhan terhadap pemenuhan standar mutu hasil kelautan dan perikanan.
3. Mewujudkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang efektif dan selaras dengan standar internasional.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Tujuan Organisasi

Tujuan pembangunan Badan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kesejahteraan sumberdaya manusia badan mutu.
3. Memberikan jaminan mutu produk perikan dan lingkungan melalui sertifikasi.
4. Menerapkan dan mengembangkan teknik dan metode perlakuan yang efektif.
5. Meningkatkan pengawasan operasional mutu keamanan hasil kelautan dan perikanan.
6. Pengembangan, penataan dan pemberdayaan organisasi yang lebih optimal.

7. Meningkatkan fungsi pelayanan terhadap pengguna jasa melalui pemanfaatan Sisterkarolin
8. Meningkatkan kinerja secara profesional dengan memanfaatkan sumber daya organisasi melalui pengembangan manajemen dan administrasi.
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan dan pelaksanaan hukum.
10. Meningkatkan jaringan kerjasama kemitraan dengan pemerintahan daerah, lembaga penelitian pemerintah dan swasta, perguruan tinggi, LSM dan mitra kerja di lapangan (Angkasa Pura, Pelindo, Bea Cukai, BKHIT Aceh,, Kepolisian, dll).
11. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan

Sasaran Organisasi

Sasaran strategis SKIPM Aceh adalah :

1. Tersedianya sarana dan prasarana SKIPM Aceh yang memadai dan tepat.
2. Tersedianya SDM yang ahli, handal dan profesional serta berkepribadian baik.
3. Tersedianya sistem data dan informasi SKIPM Aceh yang up to date dan valid.
4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan SKIPM Aceh yang kompatibel.
5. Meningkatkan peran aktif SKIPM Aceh dalam pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan di Aceh.
6. Menurunnya tingkat pelanggaran peraturan perundangan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama dengan mitra kerja.
8. Terwujudnya hasil uji laboratorium yang valid.
9. Meningkatkan aplikasi sistem administrasi
10. Diberdayakannya dan dipercayanya instansi Badan Mutu KKP Aceh oleh pengguna jasa dan pemerintah daerah sebagai referensi/rujukan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Stasiun KIPM Aceh sebagai Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP mengemban tugas menyelenggarakan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Aceh menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
4. Pelaksanaan administrasi Stasiun KIPM Aceh. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

SKIPM Aceh memiliki susunan organisasi yang terdiri dari Kepala UPT, Kepala Urusan Umum, Tim Kerja Mutu, Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Primer, Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen dan Tim Kerja Dukungan Manajerial. Kepala Urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Tim Kerja Bidang Manajemen Mutu mempunyai tugas melaksanakan manajemen mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Tim Kerja Mutu menyelenggarakan fungsi melakukan pembangunan dan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; melakukan pengelolaan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; pengembangan laboratorium acuan, laboratorium pengujian, dan jejaring laboratorium pengujian di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; melakukan. pengelolaan sistem ketertelusuran di bidang pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Tim Kerja Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen menyelenggarakan fungsi: melakukan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan penerbitan sertifikat, serta surveilan pada sertifikasi mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan; Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil kelautan dan perikanan; dan melaksanakan urusan administrasi tim kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen.

Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan. Tim kerja ini melaksanakan fungsinya melakukan teknis inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan penerbitan sertifikat, serta surveilan pada sertifikasi mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan; pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan penerbitan sertifikat, serta surveilan pada sertifikasi mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan; Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu produksi sumber daya kelautan, penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan; dan melaksanakan urusan administrasi Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer.

Tim Kerja Bidang Dukungan Manajerial mempunyai tugas melakukan Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM; Pengelolaan SDM; Pengelolaan tata laksana; Pengelolaan Kearsipan; Pengelolaan Persuratan; Penyusunan Rencana Kerja; Penyusunan Program dan Anggaran; Pengelolaan Persuratan; Pengelolaan Keuangan; Pengelolaan BMN; Pengelolaan Data, Humas dan Kerja sama.



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Aceh



Gambar 2. Jumlah Pegawai SKIPM Aceh



Gambar 3. Tingkat Pendidikan Pegawai SKIPM Aceh

Tahun 2024 jumlah pegawai SKIPM Aceh sebanyak 28 pegawai yang terdiri dari 2 orang struktural, 8 pejabat fungsional tertentu, 6 pejabat fungsional umum dan 4 orang PPNPN dan 8 Orang tenaga PJLP dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah pegawai Stasiun KIPM Aceh tahun 2024 dengan tingkat pendidikan strata dua berjumlah 4 Orang, Strata satu/ Diploma IV sebanyak 11 orang, Diploma Tiga sebanyak 5 orang , SLTA sederajat sebanyak 7 orang.

Tabel 1. Pegawai Skipm Aceh Tahun 2024

No.	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Struktural (Kepala SKIPM Aceh)	1 Orang
2	Kepala Urusan Umum/ Kepala Tim Dukman	1 Orang
	Ketua Tim Kerja	3 Orang
	a. Pengendali kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan / Inspektur mutu hasil perikanan ahli muda	1 Orang
	b. Pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan/ Inspektur mutu hasil perikanan ahli muda	1 Orang
	c. Penerapan standar dan metode uji kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan/ inspektur mutu hasil kelautan dan perikanan ahli muda	1 Orang
3.	Fungsional Tertentu:	
	a. Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	1 Orang
	b. Asisten Inspektur Mutu	3 Orang
	c. Pranata Komputer	1 Orang
	d. Pranata Keuangan APBN	1 Orang
4.	Fungsional Umum:	
	a. Analis Mutu Hasil Perikanan	2 Orang
	b. Analis Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Orang
	c. Bendahara Pengeluaran	1 Orang
	d. Pengadminstrasian Bahan Pengawasan dan Pengendalian	1 Orang
	e. Pengelola Layanan Operasional	1 Orang
5.	Tenaga Non PNS	12 Orang



BAB 3

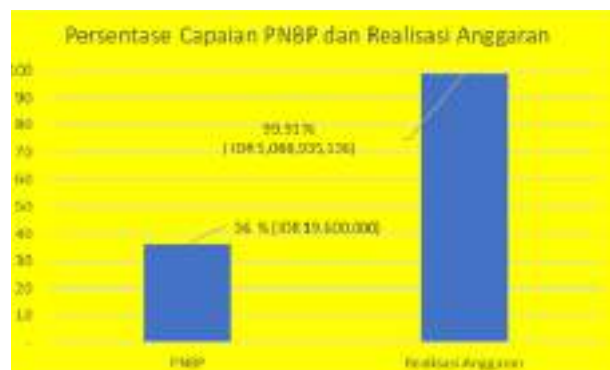
KEGIATAN SKIPM ACEH

KEGIATAN SKIPM ACEH

1. Layanan program, monitoring dan evaluasi
Layanan ini dilakukan melalui kegiatan penyusunan program dan anggaran, monitoring dan data, evaluasi dan pelaporan.

2. Layanan SDM aparatur dan organisasi
Layanan SDM meliputi perencanaan, pengembangan, mutasi, dan disiplin pegawai; administrasi jabatan fungsional dan tata usaha kepegawaian.

3. Layanan keuangan dan umum
Layanan keuangan dan umum meliputi perbendaharaan dan administrasi keuangan; BMN, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan rumah tangga, tata usaha, persuratan, dan kearsipan. Jumlah surat keluar selama 2024 adalah sebanyak 1.004 surat dan masuk sebanyak 535 surat. PNBPN selama 2024 realisasi sebesar 39 % yaitu Rp. 19.600.000, Realisasi keuangan APBN tahun 2024 mencapai 99,91% bersumber dari rupiah murni yang terdiri dari belanja modal, belanja barang dan belanja pegawai. Daftar personil yang melakukan perjalanan dinas selama 2024 sebanyak 726 kali ke berbagai daerah di Indonesia. Tujuan perjalanan dinas meliputi wilayah Aceh, Jawa, Sulawesi Sumatera dan NTB.



Gambar 5. Layanan Keuangan SKIPM Aceh Tahun 2024

4. Layanan hukum, kerjasama dan humas
meliputi kegiatan layanan pengaduan dan kehumasan. Kerjasama dengan berbagai stakeholder dilakukan oleh SKIPM Aceh.

5. Layanan internal meliputi kendaraan bermotor roda 4, peralatan dan fasilitas perkantoran; pemeliharaan gedung

6. Layanan perkantoran meliputi gaji dan tunjangan; operasional dan pemeliharaan kantor.



Gambar 4. Layanan Umum SKIPM Aceh Tahun 2024

Kegiatan Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

A. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh.

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CBIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Pada tahun 2024 Capaian indikator kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM sebesar 100 %. Berdasarkan karakteristik di wilayah kerja UPT SKIPM Aceh kegiatan primer yang telah dilaksanakan tahun 2024 adalah Cara Penangkapan Ikan Yang Baik (CPIB Kapal).

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Bidang Perikanan Tangkap yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan yang melaksanakan kegiatan tersebut pada periode sebelumnya.

Tabel 2. Sertifikasi CPIB Kapal Tahun 2024

No	Nomor Sertifikat	Nama Kapal Perikanan	Alamat	Jenis Produk
1	24-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Julisman	Desa Labuhan Bakti Kec. Teupah Selatan	Gurita
2	25-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Marliadin	Desa Labuhan Bakti Kec. Teupah Selatan	Gurita
3	26-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Safnir	Desa Labuhan Bajau Kec. Teupah Selatan	Gurita
4	27-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Epan Sumenda	Desa Labuhan Bajau Kec. Teupah Selatan	Gurita
5	28-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Muhammad Rizal	Desa Labuhan Bajau Kec. Teupah Selatan	Gurita
6	29-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Farid Hadi	Desa Labuhan Bajau Kec. Teupah Selatan	Gurita
7	30-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Kafrudin Afif	Desa Labuhan Jaya Kec. Teupah Selatan	Gurita
8	31-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Rasmanudin	Desa Labuhan Jaya Kec. Teupah Selatan	Gurita
9	32-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Biharmar	Desa Pasir Tinggi Kec. Teupah Selatan	Gurita
10	33-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Miluadi	Desa Pasir Tinggi Kec. Teupah Selatan	Gurita
11	34-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Eri Irawan	Desa Latiung Bakti Kec. Teupah Selatan	Gurita
12	35-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Riki Darmawan	Desa Latiung Bakti Kec. Teupah Selatan	Gurita
13	36-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Yoyon Tasoma	Desa Latiung Kec. Teupah Selatan	Gurita
14	37-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Indra Gunawan	Desa Badegong Kec. Teupah Selatan	Gurita
15	38-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Yusman	Desa Badegong Kec. Teupah Selatan	Gurita
16	39-CPIB/571.12.3/XI/2024	KM. Robika	Desa Badegong Kec. Teupah Selatan	Gurita



Gambar 6. Kegiatan Sertifikasi CPIB Kapal Tahun 2024

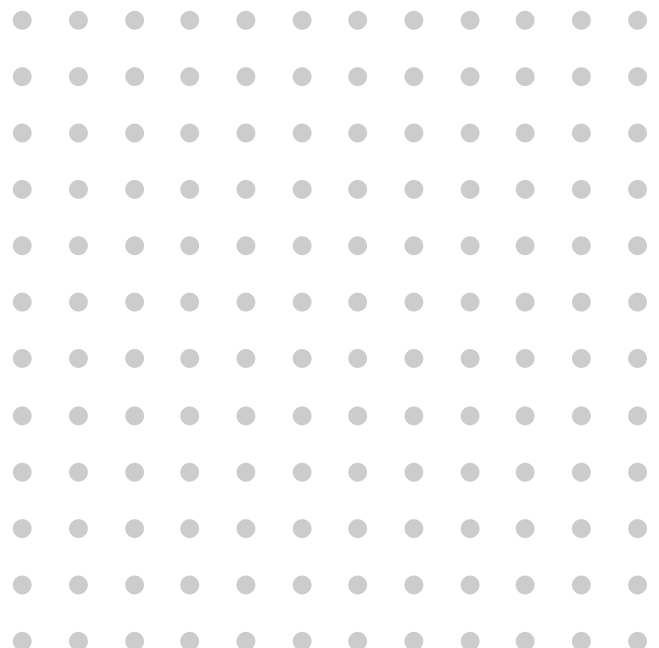
B. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh.

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produksi hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen meliputi: PMMT/ HACCP dan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh otoritas kompeten.

Sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukann sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan dicapai melalui penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Sektor produksi pasca panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Sampai dengan akhir periode tahun 2024, Rekomendasi HACCP yang diterbitkan di SKIPM Aceh sebanyak 34 produk dari total target tahunan sejumlah 30 rekomendasi pada tahun 2024, yang terdiri dari penerbitan baru dan monev sebagaimana data capaian ruang lingkup HACCP.



Tabel 3. Data ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk) SKIPM Aceh Tahun 2024

1	085/PMHACCP/PS/03/23	Fresh Cephalopoda	15 Februari 2024		B	Monrev	1	CV. King Of Me Fish	Desa Raja, Kec. Bentahara, Kab. Aceh Tamiang, Aceh-Indonesia
2	116/PMHACCP/PS/03/23	Fresh Demersal Fish	15 Februari 2024		B	Monrev			
3	063/PMHACCP/PS/03/23	Fresh Pelagic Fish	15 Februari 2024		B	Monrev			
4	044/PMHACCP/PS/03/23	Fresh Shrimp	15 Februari 2024		B	Monrev			
5	085/PMHACCP/PS/03/23	Fresh Swimming Crab	15 Februari 2024		B	Monrev			
6	087/PMHACCP/PS/03/23	Frozen Cephalopoda	15 Februari 2024		B	Monrev			
7	117/PMHACCP/PS/03/23	Frozen Demersal Fish	15 Februari 2024		B	Monrev			
8	118/PMHACCP/PS/03/23	Frozen Mildah	15 Februari 2024		B	Monrev			
9	119/PMHACCP/PS/03/23	Frozen Pelagic Fish	15 Februari 2024		B	Monrev			
10	130/PMHACCP/PS/03/23	Frozen Shrimp	15 Februari 2024		B	Monrev			
11	131/PMHACCP/PS/03/23	Frozen Soft Shell Crab	15 Februari 2024		B	Monrev	2	CV. Fishery Indo Meimur	Jl. Sungaramanja No. 15 Ujung, Kel. Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh - Indonesia
12	040/PMHACCP/PS/04/23	Fresh Pelagic Fish	02 April 2024		C	Monrev			
13	041/PMHACCP/PS/04/23	Frozen Pelagic Fish	02 April 2024		C	Monrev			
14	042/PMHACCP/PS/04/23	Frozen Shrimp	02 April 2024		C	Monrev			
15	047/PMHACCP/PS/04/23	Fresh Demersal Fish	02 April 2024		C	Monrev			
16	048/PMHACCP/PS/04/23	Frozen Demersal Fish	02 April 2024		C	Monrev	3	PT. Perikanan Indonesia - Simeulue	Jl. Lelaki Al Hasan TPI, Simeulue, Aceh - Indonesia
17	006/PMHACCP/PS/05/24	Fresh Demersal Fish	03 Mei 2024	03 Mei 2025	B	Terbit Baru			
18	015/PMHACCP/PS/05/24	Fresh Pelagic Fish	03 Mei 2024	03 Mei 2025	B	Terbit Baru			
19	009/PMHACCP/PS/05/24	Frozen Cephalopoda	03 Mei 2024	03 Mei 2025	B	Terbit Baru			
20	010/PMHACCP/PS/05/24	Frozen Demersal Fish	03 Mei 2024	03 Mei 2025	B	Terbit Baru			
21	016/PMHACCP/PS/05/24	Frozen Pelagic Fish	03 Mei 2024	03 Mei 2025	B	Terbit Baru	4	CV. Kana Cahaya Bahar	Jl. Pinggir Kali Nomor 02, Kel. Punge Blang Cut, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh - Indonesia
22	045/PMHACCP/PS/07/24	Fresh Demersal Fish	18 Juli 2024	18 Juli 2025	B	Terbit Baru			
23	047/PMHACCP/PS/07/24	Frozen Demersal Fish	18 Juli 2024	18 Juli 2025	B	Terbit Baru			
24	048/PMHACCP/PS/07/24	Frozen Lobster	18 Juli 2024	18 Juli 2025	B	Terbit Baru			
25	079/PMHACCP/PS/07/24	Fresh Pelagic Fish	22 Juli 2024	22 Juli 2025	C	Terbit Baru			
26	080/PMHACCP/PS/07/24	Fresh Tuna	22 Juli 2024	22 Juli 2025	C	Terbit Baru			
27	081/PMHACCP/PS/07/24	Frozen Pelagic Fish	22 Juli 2024	22 Juli 2025	C	Terbit Baru			
28	082/PMHACCP/PS/07/24	Frozen Tuna	22 Juli 2024	22 Juli 2025	C	Terbit Baru	5	PT. Heli Misa Jaya	Jalan Claud Danah II,
29	064/PMHACCP/PS/10/23	Frozen Shrimp			B	Monrev			
30	055/PMHACCP/PS/11/24	Fresh Tuna	13-Nov-24	13-Nov-25	B	Terbit Baru	6	CV. Anek Agam Ayah	Jalan Teungku Murnih
31	030/PMHACCP/PS/11/24	Fresh Tuna	13-Nov-24	13-Nov-25	B	Terbit Baru	7	PT. Nabua Malacca	Jalan Syah Kuala Nener
32	035/PMHACCP/PS/11/24	Frozen Pelagic Fish	19-Nov-24	19-Nov-25	B	Terbit Baru	8	PT. Yakin Padi Tana	Korps. PPS Lampulo, Jl.
33	087/PMHACCP/PS/12/23	Frozen Pelagic Fish	28/11/2024	28/11/2025	B	Monrev	9	PT. Aceh Lampulo Jaya Bahar	Jalan Singamangaraja Ujung No.15, Gampong Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh - Indonesia
34	056/PMHACCP/PS/12/23	Frozen Tuna	28-Nov-24	28/11/2025	B	Monrev			

Layanan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Produk (SKP), yang menjadi tugas baru yang dilaksanakan oleh SKIPM Aceh Tahun 2024 tercatat terdapat 3 permohonan dan jumlah sertifikat SKP yang diterbitkan sebanyak 3 sertifikat.

Tabel 4. Data Permohonan Sertifikasi Kelayakan Produk SKIPM Aceh Tahun 2024

NO	NAMA UPI	ALAMAT	RUANG LINGKUP
1	CV. Novira Abadi	Jalan T. Nyak Makam Nomor 04, Desa/Kelurahan Ie Masen Kayee Adang, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Ikan Pelagis Beku
2	CV. Novira Abadi	Jalan T. Nyak Makam Nomor 04, Desa/Kelurahan Ie Masen Kayee Adang, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Ikan Pelagis Segar
3	Koperasi Konsumen Sebera PPS Kutaraja	Jalan Sisinga Mangaraja Ujung Komplek PPS Desa/Kelurahan Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota banda Aceh, Provinsi Aceh	Ikan Kering

Tabel 5. Data Sertifikat Kelayakan Produk (SKP) SKIPM Aceh Tahun 2024

NO	NOMOR SKP	NOMOR PRUMUKU	NAMA UPI	ALAMAT	RUMAH LINGKUP	TANGGAL	BERLAKU SAMPAI	PERINGKAT
1	34162/11/SKP/BIK/2024	FB-LM/KU 0.220210000004300030001	CV. Nivris Abadi	Jalan T. Nyak Mekan Nomor 04, Desa/Kelurahan e Maden Kayee Adang, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Ikan Pelaga Beku	4 November 2024	4 November 2026	B
2	34163/11/SKP/BIK/2024	FB-LM/KU 0.220210000004300030001	CV. Nivris Abadi	Jalan T. Nyak Mekan Nomor 04, Desa/Kelurahan e Maden Kayee Adang, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh	Ikan Pelaga Segar	4 November 2024	4 November 2026	B
3	34772/11/SKP/BIK/2024	FB-LM/KU 0.50624006421900030001	Koperasi Konsumen Sebera PPS Kutaraja	Jalan Siangs Manganja Dung Komplek PPS Desa/Kelurahan Lampulo, Kec. Kuta Alam, Kota	Ikan Kering	13 Desember 2024	13 Desember 2026	B



Gambar 7. Kegiatan Inspeksi dan Monitoring Penerapan HACCP di UPI Tahun 2024

C . PERSENTASE PENGAWASAN MUTU HASIL PERIKANAN DI WILAYAH RI LINGKUP UPT STASIUN KIPM ACEH

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoksin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil kelautan dan perikanan.

Monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya tidak hanya merupakan salah satu upaya dalam mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan, tetapi juga sebagai upaya untuk menjawab tantangan global dimana tuntutan masyarakat terhadap bahan pangan yang aman dan bergizi semakin meningkat. Kegiatan monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya dilakukan di pelabuhan perikanan, pasar dan supplier/miniplant, ini sebagai upaya pencegahan sebelum bahan pangan sampai kepada konsumen sehingga ketahanan pangan dan keamanan pangan secara global dapat terwujud.

Lokasi dari kegiatan pengawasan ini dilakukan di Kabupaten/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional, supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan lokasi wilayah perairan/pelabuhan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestik yang bebas dari cemaran marine biotoksin dan cemaran kimia berbahaya.



Pengambilan contoh produk perikanan yang diperdagangkan dipasar tradisional yang dilakukan oleh Inspektur Mutu bersama dengan pihak pengelola pasar tradisional yaitu di PPS Kutaraja Lampulo, Pasar Al-Mahira Lamdingin, Pasar Keutapang, Pasar Lambaro.. Contoh tersebut selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap suhu, organoleptik, uji kimia dan mikrobiologi di laboratorium yang terakreditasi. Selain itu, dilakukan juga pengamatan kondisi sarana prasarana dari lokasi usaha yang menjadi objek pengawasan dan pengendalian yang bertujuan untuk menilai penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk konsumsi domestik



Pasar Almahira



Pasar Lambaro



PPS Kutaraja Lampulo



Pasar Keutapang

Gambar 8. Kegiatan Pengawasan Domestik Mutu Hasil Perikanan Domestik

Monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil kelautan dan perikanan bertujuan untuk :

1. Sebagai jaminan mutu dan keamanan bahan pangan produk perikanan khususnya kerang;
2. Mendapatkan data dan informasi kondisi residu dan keamanan hasil perikanan sebagai bahan rekomendasi kepada Otoritas Kompeten;
3. Memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan yang relevan untuk menjamin implementasi program monitoring residu dan keamanan hasil perikanan untuk produk perikanan sesuai keamanan hasil perikanan untuk produk perikanan sesuai dengan standar nasional dan internasional.

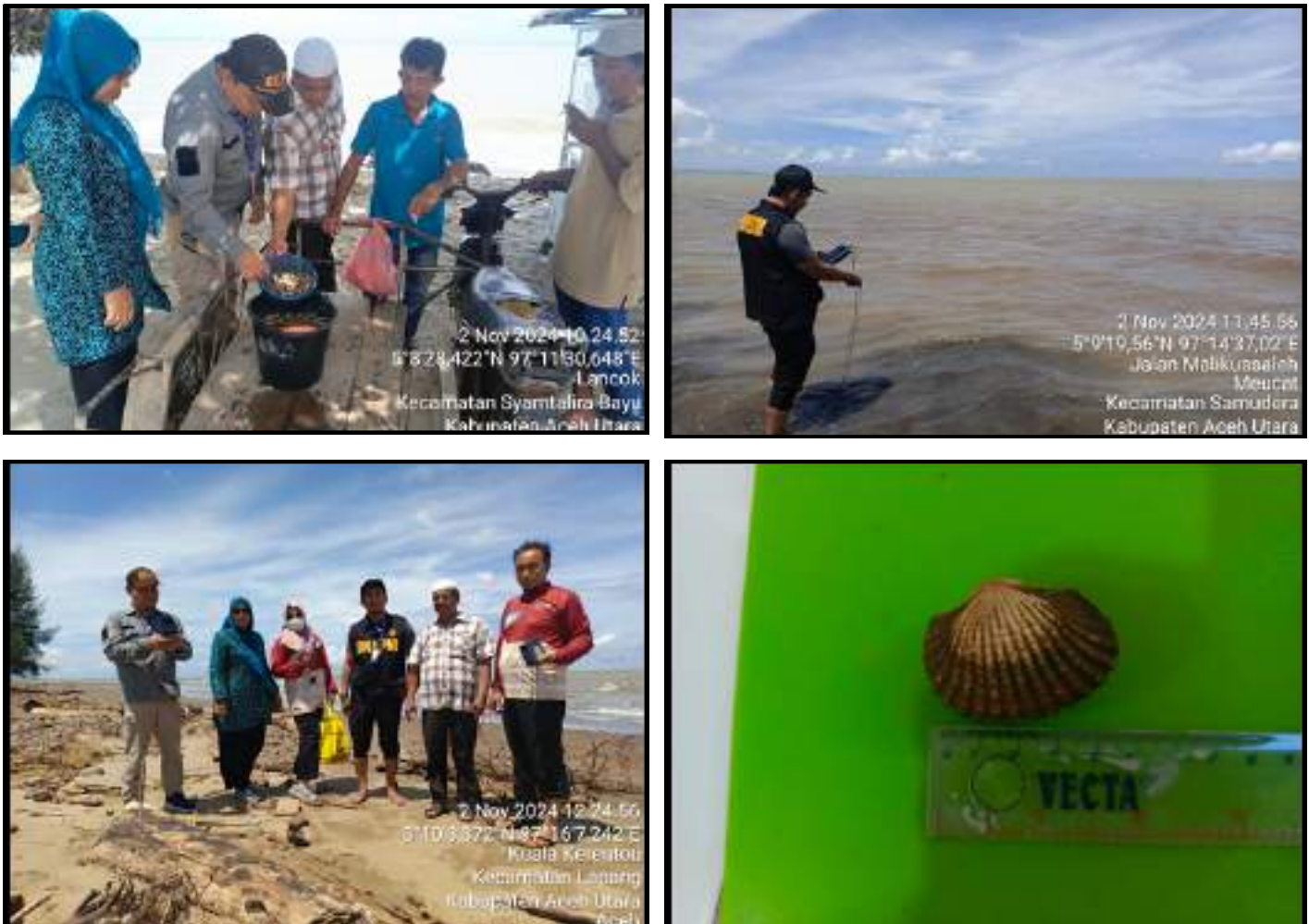
Lokasi dari kegiatan ini dilaksanakan di 2 lokasi perairan wilayah Meulaboh (Aceh Barat) dan Aceh Utara sesuai dengan prosedur monitoring perairan cemaran marine biotoxin dan logam berat.

Pengambilan contoh yang dilakukan pada saat monitoring adalah di beberapa titik lokasi yang berbeda seperti yang tertera pada tabel 1 dan 2 diatas. Di setiap lokasi dilakukan pengambilan contoh dari sampel kerang. Bersamaan dengan pengambilan contoh juga dilakukan pengujian parameter fisika dan kimia air dan pengamatan sedimen. Semua sampel yang diambil akan dilakukan pengujian secara laboratorium dengan parameter uji logam berat (Cd, Hg, Pb), dan parameter Biotoxin (ASP, PSP, NSP).

Pengujian contoh dengan parameter uji logam berat (Cd, Hg, Pb) dan parameter Biotoxin (ASP, PSP, NSP) di uji di Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta. Contoh dikirim ke setiap Laboratorium dengan menyertakan kode sampel dan permohonan parameter uji yang akan diperiksa.

Perairan Kabupaten Aceh Barat (Meulaboh)



Perairan Kabupaten Aceh Utara

Gambar 9 . Kegiatan Pengambilan Sampel Marine Biotoxin

D. RASIO EKSPOR IKAN DAN HASIL PERIKANAN YANG DITERIMA OLEH NEGARA TUJUAN EKSPOR LINGKUP UPT STASIUN KIPM ACEH

Keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor merupakan indikator layanan kepastian bahwa hasil perikanan yang dikeluarkan dari dalam wilayah RI bebas dari hama penyakit ikan karantina/penyakit yang dipersyaratkan, sesuai jenis dan jumlahnya dengan dokumen yang menyertai serta bebas/tidak berpotensi sebagai media pembawa penyakit zoonosis (bersifat menular ke manusia), sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Dengan ekspor produk hasil perikanan itu dapat diterima sampai keluar negeri telah dipastikan bahwa ikan itu sehat, terjamin, dan aman dikonsumsi. Berikut data sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2024.

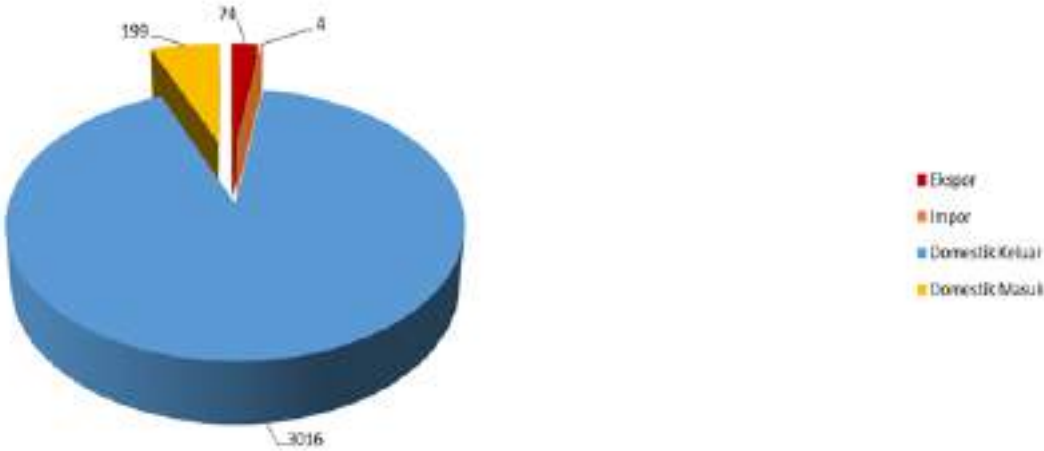
Tabel 6. Data Sertifikasi Ekspor Ikan Hasil Perikanan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tahun 2024

No	Bulan	Sertifikat (Jumlah)	Pemenuhan Persyaratan Negara Tujuan			
			Diterima		Ditolak	
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Januari	1	1	100	0	0
2	Februari	1	1	100	0	0
3	Maret	1	1	100	0	0
4	April	-	-	100	0	0
5	Mei	5	5	100	0	0
6	Juni	3	3	100	0	0
7	Juli	3	3	100	0	0
8	Agustus	1	1	100	0	0
9	September	-	-	100	0	0
10	Oktober	1	1	100	0	0
11	November	2	2	100	0	0
12	Desember	1	1	100	0	0
Total / Rata - Rata		19	19	100	0	0

Tabel 7. Data Lalu Lintas SKIPM Aceh Tahun 2024

Kegiatan	Frek	Nilai (Rp)	Jumlah		PNBP (Rp)
			Ekor	kg	
Ekspor	74	Rp. 5.161.453.710	372.435	76.081,50	Rp. 20.480.000
Impor	4	Rp. 2.131.673.270	1.966	-	
Domestik Keluar	3016	Rp. 210.754.204.868	11.619.331,14	97.914.086	
Domestik Masuk	199	Rp. 3.859.453.667	349.047.551	2.587	

Grafik lalulintas SKIPM Aceh Berdasarkan Frekuensi Tahun 2024



Gambar 10. Grafik Lalu lintas berdasarkan frekuensi Tahun 2024

Selama kurun waktu tahun 2024 terjadi perubahan nomenklatur terhadap penyelenggaraan kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama di Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang namanya berubah menjadi Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) berdasarkan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai tindak lanjut terbitnya Perpres Nomor 38 Tahun 2023 tentang KKP dan Perpres Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Ikan, segala bentuk tindakan karantina sudah beralih kewenangannya ke Badan Karantina Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaan operasional sertifikasi Karantina Ikan dan pengendalian mutu selama masa

transisi penyelenggaraan Barantin dan BPPMHKP masih bersama-sama berdasarkan Surat Edaran Kepala BPPMHKP Nomor : B.149/BPPMHKP/KH.410/II/2024 tentang operasional Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu selama masa transisi penyelenggaraan kelembagaan BARANTIN dan BPPMHKP sampai dengan terbitnya regulasi terkait. Pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditentukan. Penerbitan sertifikat mutu untuk kegiatan ekspor dilakukan oleh KKP sedangkan untuk kegiatan sertifikasi ekspor untuk komoditi hidup, kegiatan domestik keluar, domestik masuk dan kegiatan impor di lakukan oleh petugas BARANTIN dalam hal ini masih menggunakan aplikasi sisterkaroline.

Tabel 8 . Jumlah Media Pembawa Ekspor Hidup Tahun 2024

NO	KOMODITI	VOLUME	SATUAN	NILAI KOMODITI (Rp)
1	Kerang Darah	356.770	Ekor	Rp. 955.018.520
2	Kepiting	6.793	Ekor	Rp. 254.813.092
3	Benih Kerapu	100	Ekor	Rp. 500.000
4	Siput	3.520	Ekor	Rp. 28.160.000
5	Udang Air Tawar	3.150	Ekor	Rp. 8.098.650
6	Lobster	2.102	Ekor	Rp. 10.710.000

Tabel 9. Jumlah Media Pembawa Ekspor Non Hidup Tahun 2024

No.	KOMODITI	VOLUME	SATUAN	NILAI KOMODITI
1	Tuna	52.543,50	Kg	Rp. 1.652.803.672
2	Gurita	15.096	Kg	Rp. 1.412.925.00
3	Lobster	40	Kg	Rp. 8.400.000
4	Marlin	8.300	Kg	Rp. 710.397.000
5	Bawal Laut	102	Kg	Rp. 6.120.000



Gambar 11. Kegiatan pengawasan produk perikanan ekspor

Kegiatan Tim Kerja Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar

A. NILAI PEMENUHAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU LABORATORIUM PENGUJI DAN LEMBAGA INSPEKSI LINGKUP UPT STASIUN KIPM ACEH (%).

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen.

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum;
2. Persyaratan Struktural;
3. Persyaratan Sumberdaya;
4. Persyaratan Proses;
5. Persyaratan Sistem Manajemen.



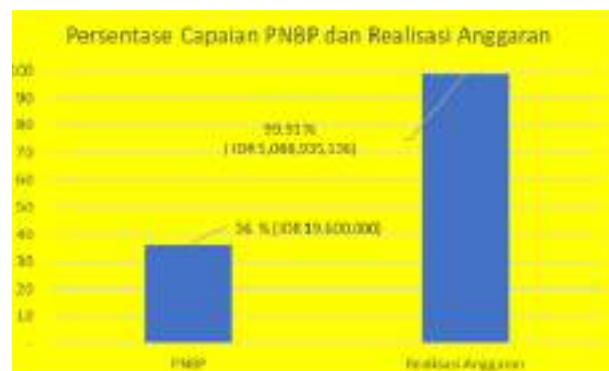
Gambar 12. Kegiatan Re-Akreditasi penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012 Skipm Aceh

Kegiatan Tim Kerja Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Stasiun KIPM Aceh

1. Layanan program, monitoring dan evaluasi
Layanan ini dilakukan melalui kegiatan penyusunan program dan anggaran, monitoring dan data, evaluasi dan pelaporan.

2. Layanan SDM aparatur dan organisasi
Layanan SDM meliputi perencanaan, pengembangan, mutasi, dan disiplin pegawai; administrasi jabatan fungsional dan tata usaha kepegawaian.

3. Layanan keuangan dan umum
Layanan keuangan dan umum meliputi perbendaharaan dan administrasi keuangan; BMN, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan rumah tangga, tata usaha, persuratan, dan kearsipan. Jumlah surat keluar selama 2024 adalah sebanyak 1.004 surat dan masuk sebanyak 535 surat. PNBPN selama 2024 realisasi sebesar 39 % yaitu Rp. 19.600.000, Realisasi keuangan APBN tahun 2024 mencapai 99,91% bersumber dari rupiah murni yang terdiri dari belanja modal, belanja barang dan belanja pegawai. Daftar personil yang melakukan perjalanan dinas selama 2024 sebanyak 726 kali ke berbagai daerah di Indonesia. Tujuan perjalanan dinas meliputi wilayah Aceh, Jawa, Sulawesi Sumatera dan NTB.



Gambar 5. Layanan Keuangan SKIPM Aceh Tahun 2024

4. Layanan hukum, kerjasama dan humas meliputi kegiatan layanan pengaduan dan kehumasan. Kerjasama dengan berbagai stakeholder dilakukan oleh SKIPM Aceh.

5. Layanan internal meliputi kendaraan bermotor roda 4, peralatan dan fasilitas perkantoran; pemeliharaan gedung

6. Layanan perkantoran meliputi gaji dan tunjangan; operasional dan pemeliharaan kantor.



Gambar 4. Layanan Umum SKIPM Aceh Tahun 2024

A. INDEKS SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LAYANAN PUBLIK DI UPT STASIUN KIPM ACEH

Pelayanan publik oleh aparaturnya pemerintahan dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media atau surat kabar sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparaturnya pemerintahan. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan amanat undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional maka perlu dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan dan berdasarkan Undang - Undang

No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik menegaskan bahwa penyelenggara Negara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik secara berkala. Selain itu, data SKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Kep/14/M.PAN/2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh merupakan unit pelaksana teknis (UPT) BPPMHKP, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Mengacu pada hal tersebut, maka tim survey dan pengolahan data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Stasiun Karantina Ikan, dan Keamanan hasil Perikanan Aceh melakukan pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan unit pelayanan publik Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh.

Pada tahun 2024, SKIPM Aceh melakukan pengukuran survei kepuasan masyarakat per triwulan. Pada periode triwulan I, SKIPM Aceh melakukan pengukuran dengan menyebarkan link survey (<https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/75>) terhadap 16 responden pengguna jasa yang berada di lokasi pelayanan Stasiun KIPM Aceh dan bekerja pada waktu layanan sedang berlangsung atau jam kerja layanan. Kuesioner yang telah diisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi (<https://ptsp.kkp.go.id/skm>). Proses analisis data sesuai dengan petunjuk dalam peraturan Menpan & RB Nomor 14 Tahun 2017 sehingga sesuai dengan standar nasional. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai survey SKM untuk triwulan I sebesar 90,62 dengan Mutu Pelayanan A dan predikat “Sangat Baik”.

Pada Triwulan II, metode dalam pengukuran survey kepuasan Masyarakat di Stasiun KIPM Aceh dilakukan berdasarkan Kepmen KP No. 54 Tahun 2022. Pengukuran survei kepuasan masyarakat dilakukan terhadap pelayanan Sertifikasi Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (Ekspor, Domestik Keluar, Domestik Masuk, penjaminan HACCP, dan pengujian laboratorium). Pengukuran dilakukan dengan merekap/mendata responden SKIPM Aceh sebanyak 18 responden yang mengisi kuesioner secara online dan terintegrasi pada link www.ptsp.kkp.go.id/skm.

Pada triwulan III, metode pengukuran yang digunakan sama dengan triwulan kedua. Jumlah responden pada triwulan III adalah sebanyak 10 responden yang mengisi kuesioner secara online dan terintegrasi pada link www.ptsp.kkp.go.id yang disebar pada pengguna jasa layanan di Stasiun KIPM Aceh setelah pengguna jasa selesai melakukan pengambilan hc/konsultasi/layanan lain. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas unsur pelayanan SKIPM Aceh, diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 91,94 dengan kategori “Sangat Baik”. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan, secara umum kualitas pelayanan pada SKIPM Aceh dipersepsikan baik oleh masyarakat pengguna jasa. Nilai ini berada dalam nilai konversi indeks persepsinya berada antara 88,31 – 100,0. Nilai SKM ini menunjukkan adanya penurunan dari triwulan sebelumnya. Terdapat peningkatan unsur pelayanan yang menunjukkan bahwa perlunya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Pada periode akhir tahun 2024 ini, SKIPM Aceh melakukan kembali pengukuran survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Sertifikasi Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (Ekspor, penjaminan HACCP dan pengujian laboratorium), yaitu pelaksanaan kegiatan pada bulan sampai dengan akhir tahun 2024 yang diisi oleh responden. Pengukuran dilakukan dengan merekap/mendata responden SKIPM Aceh sebanyak 12 (dua belas) responden yang mengisi kuesioner secara online dan terintegrasi pada link www.ptsp.kkp.go.id/skm

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas unsur pelayanan SKIPM Aceh, diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 91,44. Nilai capaian yang dianggap menggambarkan bahwa kinerja unit pelayanan ini dalam memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat masuk dalam kategori kinerja pelayanan “Sangat Baik”.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan, secara umum kualitas pelayanan pada SKIPM Aceh dipersepsikan sangat baik oleh masyarakat pengguna jasa. Nilai ini berada dalam interval indeks persepsi antara 3,5324 – 4,0 dengan nilai konversi indeks persepsinya berada antara 88,31 – 100,00 sebagaimana terlihat pada gambar dibawah.

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat peningkatan pada nilai keseluruhan unsur pelayanan yang menjadi unsur survei kepuasan masyarakat pada periode sebelumnya. Hal ini menjadi informasi penting agar SKIPM Aceh semakin meningkatkan kualitas pelayanannya, agar pengguna jasa layanan mendapatkan pelayanan lebih baik di masa yang akan datang. Rencana aksi yang dilakukan untuk mendukung indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2024 adalah dengan melakukan pengembangan pelayanan publik untuk memudahkan pengguna layanan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut yang telah ditempuh sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan.



Gambar 13. Publikasi SKM SKIPM Aceh Tahun 2024

B. INDEKS PROFESIONALITAS ASN UPT STASIUN KIPM ACEH

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Berdasarkan data pada ropeg.kkp.go.id tahun 2024, target dari indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar 86, serta dengan target periode semester I tahun 2024 sebesar 81. Dalam periode tahun 2024 dilakukan perhitungan capaian realisasi kembali melalui <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>, melalui halaman tersebut diperoleh nilai IP ASN SKIPM Aceh sebesar 91,94 atau setara dengan 106,91 %. Capaian nilai tersebut dicapai atas kerjasama seluruh pegawai SKIPM Aceh yang mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat terkait kompetensi yang dapat meningkatkan profesionalitas kinerja.



No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Ditinjau	Kualifikasi Sesuai (%)	Kompetensi Sesuai (%)	Kinerja Sesuai (%)	Disiplin Sesuai (%)	Nilai IP	Revisi
1	STASIUN KIPM Aceh	45	100%	100%	100%	100%	91,94	100%

Gambar 14. Capture Nilai IP ASN Stasiun KIPM Aceh Tahun 2024

C. NILAI MINIMAL YANG DIPERSYARATKAN UNTUK PEMBANGUNAN UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI UPT KIPM ACEH.

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Mengacu pada Pedoman dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan: penetapan status unit kerja berpredikat Menuju WBK yaitu dengan memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 serta ditetapkan melalui SK Menteri KP dan Piagam Penghargaan. Selanjutnya dalam pelaksanaannya terdapat Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PER-IRJEN/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP.

Untuk menjaga terpeliharanya predikat WBK/WBBM, maka perlu dilakukan pembinaan yang efektif. Pembinaan harus dilakukan terhadap Unit Kerja secara institusional dan terhadap pegawai pada Unit Kerja yang bersangkutan. Pembinaan terhadap Unit Kerja dapat dilakukan dengan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur, pemberian fasilitas dan anggaran kedinasan yang memadai, pelatihan teknis, perbaikan kesejahteraan, kenaikan pangkat istimewa, mendapatkan prioritas tambahan anggaran dalam APBNP atau kegiatan lainnya yang kesemuanya mengarah pada tujuan untuk mempersempit peluang/kesempatan melakukan korupsi. Selain itu juga dilakukan pembinaan karakter pegawai melalui pelatihan anti korupsi atau pembentukan integritas, pendekatan spiritual/keagamaan untuk memperbaiki atau meluruskan niat, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk meninggalkan sikap dan perbuatan koruptif serta perbuatan yang melanggar hukum lainnya.

Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan mengacu kepada PermenKP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai minimum untuk berpredikat WBK dicapai dengan evaluasi untuk memperoleh hasil nilai WBK ≥ 75 yang terdiri dari: Nilai Pengungkit yang diperoleh dari aspek Pemenuhan dan Reform (manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, pelayanan publik) dan Nilai Hasil yang diperoleh dari komponen birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Penilaian Unit Kerja dilingkungan BPPMHKP dengan kriteria penilaian sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara mandiri dan menggunakan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP. SKIPM Aceh menjadi salah satu satuan kerja yang diusulkan untuk dilakukan penilaian dari 5 satuan kerja. Hasil pendampingan dan penilaian mandiri dilaksanakan secara kunjungan langsung ke unit kerja maupun online. Seluruh komponen di SKIPM Aceh berupaya untuk meningkatkan nilai capaian indikator kinerja ini, dengan menjaga konsistensi dan melakukan pembaharuan pemenuhan seluruh data dukung komponen pengungkit dan hasil secara berkala sesuai ketentuan.

Tabel 10. Hasil Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Lingkup BPPMHKP pada tahun 2024

No.	Unit Kerja	Pengungkit	Pemenuhan	Reform	Hasil	Total
1	Stasiun KIPM Aceh	48,58 (80,96%)	24,81 (82,70%)	23,77 (79,23%)	33,41 (83,52%)	81,90
2	Stasiun KIPM Bandung	42,51 (72,52%)	22,35 (74,50%)	21,16 (70,54%)	35,66 (79,37%)	79,97
3	Stasiun KIPM Jambi	47,76 (79,61%)	24,33 (81,10%)	23,43 (78,11%)	35,78 (89,44%)	83,64
4	Stasiun KIPM Padang	45,91 (76,52%)	22,81 (73,38%)	23,90 (79,66%)	37,70 (94,25%)	83,61
5	Stasiun KIPM Palembang	40,60 (67,66%)	17,80 (59,34%)	22,80 (75,99%)	35,05 (87,63%)	76,65

D. NILAI PENILAIAN MANDIRI SAKIP LINGKUP UPT STASIUN KIPM ACEH.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP SKIPM Aceh dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni : perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%). Penilaian evaluasi AKIP dilakukan menggunakan LHE yang terdapat pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu aplikasi Kinerjaku KKP. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP. Nilai PM SAKIP Level II adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I.

E. NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN LINGKUP UPT STASIUN KIPM ACEH

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Secara otomatis nilai capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dapat diperoleh melalui aplikasi monev Kemenkeu di halaman <https://monev.kemenkeu.go.id/> yang terkoneksi juga dengan aplikasi SAKTI. Capaian yang diperoleh adalah sebesar 92,50 dari target sebesar 71 atau setara dengan 120 %.

F. NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN LINGKUP UPT STASIUN KIPM ACEH

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Aspek pengukuran IKPA meliputi aspek : kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran; kualitas implementasi pelaksanaan anggaran; dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mempunyai target dengan pengukuran secara semester. Pada tahun 2024, indikator kinerja ini memiliki target tahunan dengan nilai sebesar 93,76, dan target semester I sebesar 83. Capaian indikator tersebut sesuai dengan data dari aplikasi OM-SPAN modul Monev PA yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Pada tahun 2024 terdapat peningkatan nilai capain menjadi sebesar 98, 41.

G. PENYELESAIAN TEMUAN BPK LINGKUP UPT STASIUN KIPM ACEH

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure),

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Selama tahun 2024 tidak ada audit yang dilaksanakan secara langsung oleh BPK di SKIPM Aceh. Namun telah dilakukan upaya pemenuhan seluruh dokumen serta data dukung sesuai ketentuan secara online. Berdasarkan data BPPMHKP tahun 2024 untuk satuan kerja SKIPM Aceh tidak terdapat temuan BPK. Sehingga capaian indikator kinerja Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh tahun 2024 persentasenya adalah sebesar 100 %.

H. PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP UPT STASIUN KIPM ACEH

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s.d Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan. Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP.

Pada tahun 2024 SKIPM Aceh menjadi salah satu lokasi pengawasan audit oleh Inspektorat Jenderal KKP. Berdasarkan audit kinerja tersebut, SKIPM Aceh telah berupaya menindaklanjuti hasil temuan audit kinerja. Sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2024, seluruh temuan dari pengawasan yang dilaksanakan telah selesai ditindaklanjuti. Berdasarkan data tersebut, capaian nilai TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan),

indikator kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja adalah berstatus “SUKSES” dengan capaian sebesar 100 % dari target sebesar 80 %, atau setara dengan 120 %.

I. TINGKAT KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA LINGKUP UPT STASIUN KIPM ACEH

Indikator kinerja tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun KIPM Aceh adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup SKIPM Aceh. dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan PBJ UPT BPPMHKP diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Berdasarkan surat dari Inspektorat Jenderal KKP Nomor B.519/ITJ.4/HP.660/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, perihal Hasil Pengawasan Lainnya dalam rangka Penilaian Efektifitas Pengawasan dan Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun 2024 lingkup BPPMHKP. Penilaian tingkat kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP tahun 2024 adalah sebesar 84,34 %. Nilai tersebut merupakan gambaran kegiatan pengadaan barang/ jasa stasiun kerja yang mewakili seluruh unsur yang menjadi parameter penilaian. Secara detail nilai tersebut terdiri dari unsur ketersediaan manajemen resiko sebesar 10 %; perencanaan dan persiapan sebesar 13,75 %; presentase pemilihan penyedia yang dilaksanakan melalui SPSE sebesar 10,00 %; kesesuaian tahap pelaksanaan sebesar 31,84 %; laporan penyelenggaraan PBJ sebesar 3,75 %; serta persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan sebesar 15 %.

J. TINGKAT KEPATUHAN BMN LINGKUP UPT STASIUN KIPM ACEH.

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup SKIPM Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada pengguna atau kuasa pengguna barang dan pengelola barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup UPT diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023;
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2023;
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian;
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Pada tahun 2024 indikator nilai tingkat kepatuhan pengelolaan BMN mengalami kenaikan nilai target menjadi 80 % dari tahun sebelumnya sebesar 77,5 %. Berdasarkan surat dari Sekretaris BPPMHKP dengan nomor B.67/BPPMHKP.1/PL.760/I/2025 tanggal 3 Januari 2025, perihal Capaian IKU Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup BPPMHKP Tahun 2024, diperoleh nilai tingkat kepatuhan pengelolaan BMN satuan kerja lingkup BPPMHKP Tahun 2024 sebesar 97,50 %, atau setara dengan 120 %.

Kegiatan SKIPM ACEH 2024

Selain dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan indikator kinerja utama, di tahun 2024 SKIPM Aceh juga melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

a. Penanda tanganan Kerjasama Antara BPPMHKP Aceh dengan PT. Pos Indonesia

Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan antara Badan Mutu KKP Aceh dengan PT. Pos yang bertujuan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem digital untuk mengintegrasikan antara Pos Aja, Pos Pay pada aplikasi AQUAFISCOM juga untuk berbagi pakai dalam hal data dan informasi.



Gambar 15 . Penandatanganan Kerja Sama antara BPPMHKP Aceh dengan PT. Pos

b. Soft Launching aplikasi Aceh Quality Assurance Fisheries Information Services and Comunication (AQUAFISCOM).

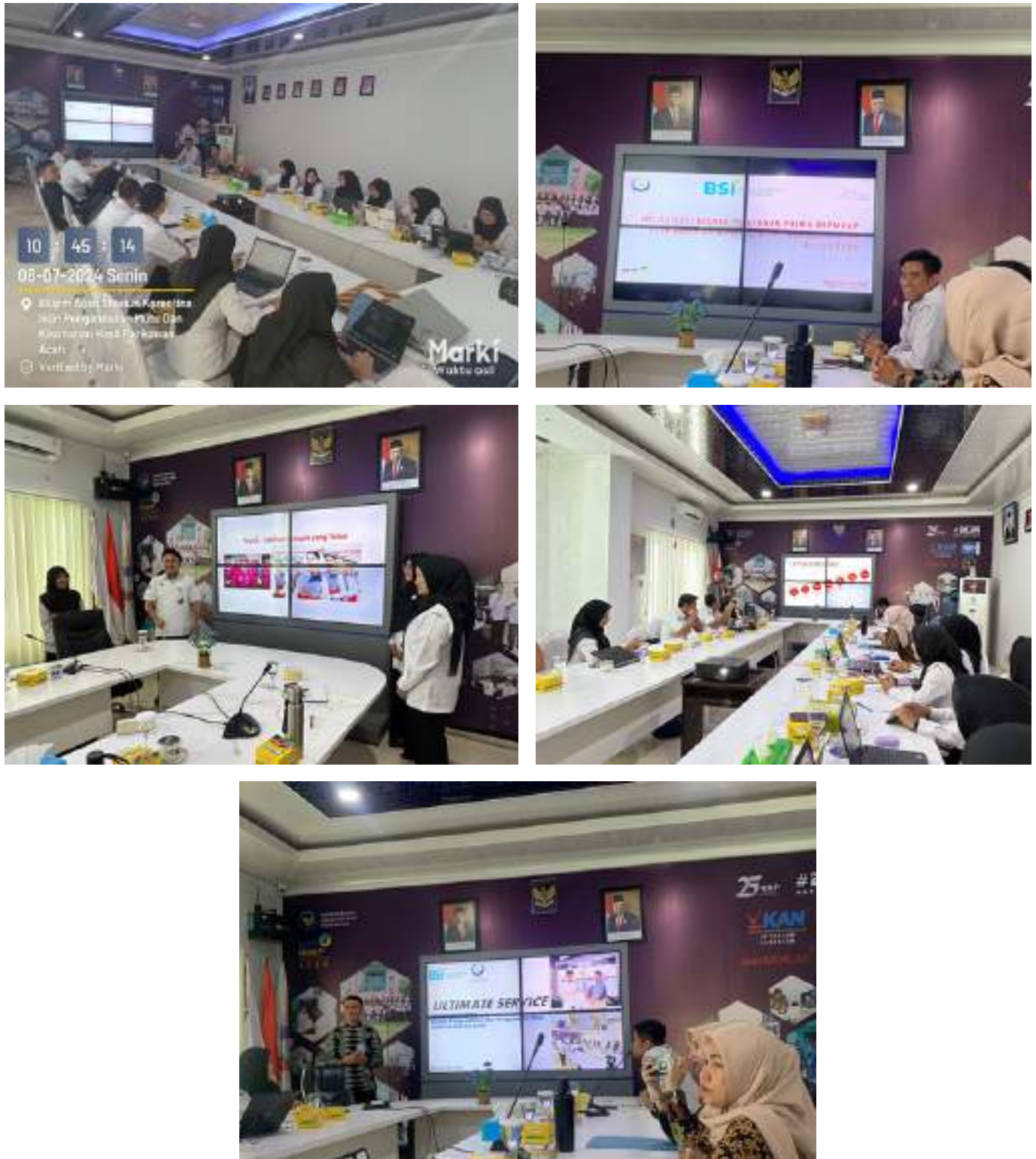
Aceh Quality Assurance Fisheries Information Services and Comunication (AQUAFISCOM) adalah bentuk inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik SKIPM Aceh terhadap para stakeholder dan pelaku usaha. aplikasi ini di bangun bertujuan untk memberikan kemudahan, kecepatan dan ketertelusuran sertifikasi yang menjadi kewenangan SKIPM/BPPMHKP Aceh.



Gambar 16. Dokumentasi Soft Launching Aplikasi AQUAFISCOM

c. Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima

Budaya Pelayanan Prima merupakan salah satu elemen dalam upaya mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dimana Skipm Aceh merupakan penyelenggara layanan.



Gambar 17. Dokumentasi Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima

Dokumentasi Kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka Peringatan Hari Ikan Nasional Tahun 2024



Gambar 18. Foto Kegiatan Makan Bergizi Gratis Tahun 2024

**PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2024**



Gambar 19. Foto penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

KEGIATAN AKSI BERSIH PANTAI DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI LAUT SEDUNIA TAHUN 2024



Gambar 20. Kegiatan Bersih Pantai Tahun 2024

Forayya SURIKON

Dokumentasi Kegiatan Pembagian Susu Ikan dalam Rangka HUT KKP RI ke-25 Tahun 2024



Gambar 21. Foto Kegiatan Pembagian Susu Ikan dalam rangka HUT KKP RI Tahun 2024

BPPMHKP ACEH

Bersahaja Efektif Unggul Transparan Akuntabel Ramah Inovatif



BAB 4

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian atas 15 indikator kinerja SKIPM Aceh yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas disajikan pada gambar dibawah ini.



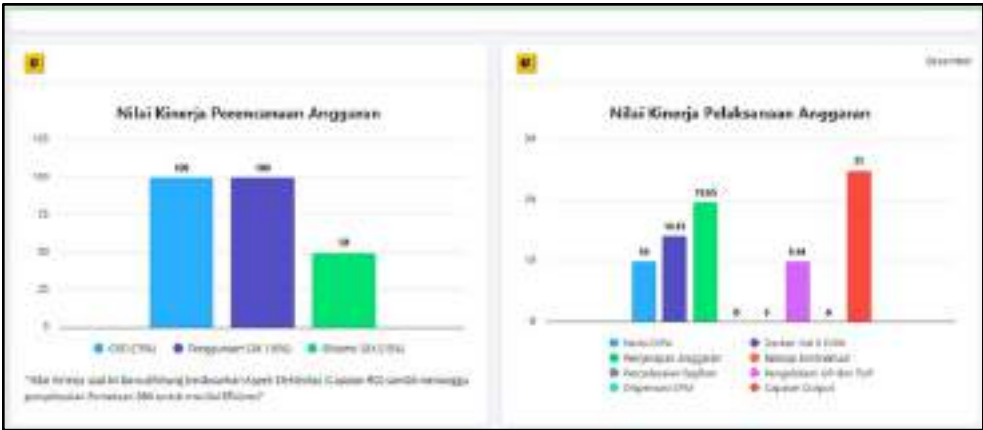
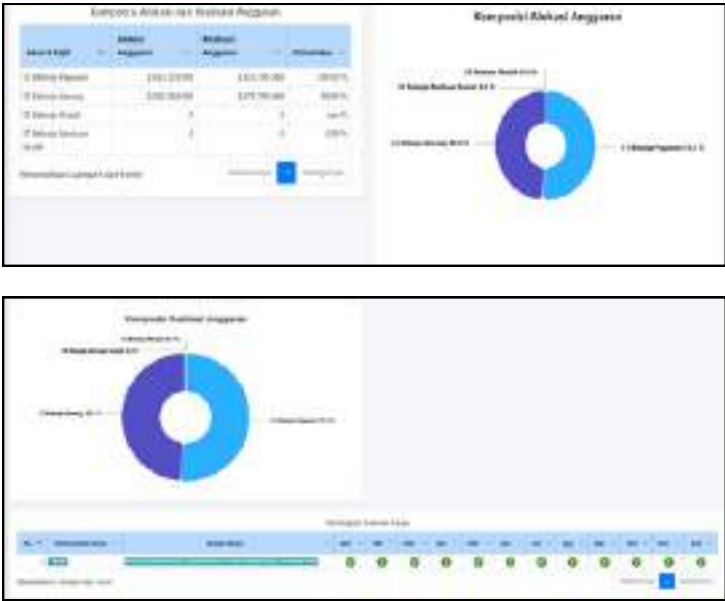
KINERJA ANGGARAN

Rencana kerja dan anggaran Stasiun KIPM Aceh tahun 2024 diarahkan untuk target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan. Alokasi anggaranSKIPM Aceh tahun2024 berdasarkan data RKAKL dengan pagu terbaru adalah sebesar Rp. 5.093.642.000,-. Nilai persentase realisasi anggaran atau keuangan SKIPM Aceh pada tahun 2024 hingga akhir bulan Desember tahun 2024 terserap sebesar 99,91 %, dengan nilai Rp. Rp. 5.088.935.747,-. Pencapaian atau realisasi ini tentunya adalah upaya maksimal yang dapat dilakukan dan merupakan hasil kerja sama seluruh komponen di SKIPM Aceh.

Selama akhir periode tahun 2024 terdapat perubahan pagu anggaran, baik karena realokasi anggaran karantina ikan, automatic adjustment maupun karena revisi administrasi. Strategi atau rencana untuk periode selanjutnya, SKIPM Aceh akan lebih memperkuat sisi perencanaan kegiatan dan lebih cermat dalam melakukan pencairan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan ditetapkan, dan secara periodik akan dilakukan konsolidasi serta monitoring dan evaluasi. Selain itu SKIPM Aceh berupaya adaptif melakukan upaya mitigasi resiko dan realistis dalam menghadapi kebijakan-kebijakan atau penyesuaian otomatis yang masih diterapkan dalam pengelolaan anggaran pada periode selanjutnya.



Gambar. 23
Komposisi Pagu dan Detail Realisasi Tahun 2024



Gambar. 24
Komposisi Alokasi, Realisasi, Nilai Kinerja dan Partisipasi Satuan Kerja Tahun 2024

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mempunyai target dengan pengukuran secara semester. Pada tahun 2024, indikator kinerja ini memiliki target tahunan dengan nilai sebesar 93,76, dan target semester I sebesar 83. Capaian indikator tersebut sesuai dengan data dari aplikasi OM-SPAN modul Monev PA yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Berikut ditampilkan tangkap layar, serta tabel target dan realisasi capaian indikator kinerja ini.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I ACEH

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DES2024

No	Kode KPPN	Kode DA	Kode Gaiem	Uraian Subkec	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Kinerja Bobot	Dispersasi SPN (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Kinerja Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Pelaksanaan RI DIPA	Penyisipan Anggaran	Biaya Kontrakasi	Penyesuaian Tagihan	Pengeluaran UP dan TUP	Capaian Output				
1	001	032	948990	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH	Nilai	100.00	94.21	58.25	0.00	0.00	59.44	100.00	79.73	80%	0.00	96.41
					Bobot	10	10	20	0	0	10	25				
					Nilai Awal	10.00	14.13	19.65	0.00	0.00	9.94	25.00				
					Nilai Akhir	87.11		58.85			100.00					

Gambar. 25

Capture Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) SKIPM Aceh Pada Aplikasi OM SPAN Tahun 2024



PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Tahunan Stasiun KIPM Aceh merupakan potret pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 yang telah memberikan dampak positif berkaitan dengan sistem penjaminan mutu produk perikanan khususnya di provinsi Aceh. Capaian kinerja Tahun 2024 secara keseluruhanseluruhnya memenuhi dan melebihi target yang telah ditetapkan. hal tersebut ditandai dengan pencapaian sasaran strategis tercapai secara maksimal yaitu sebesar 114,61%. Secara keseluruhan capaian kinerja Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar

Untuk mendukung capaian kinerja Tahun 2024 SKIPM Aceh mengelola anggaran sebesar Rp. 5.093.642,000,. dengan realisasi sebesar Rp. 5.088.935.747,- atau mencapai 99.91 % dari total pagu anggaran tahun 2024.

Sangat disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program program kegiatan di Stasiun KIPM Aceh masih memerlukan perbaikan dan kerja keras oleh seluruh jajaran Stasiun KIPM Aceh untuk itu sangat diperlukan sinergi internal dan dukungan lintas sektor serta Lembaga terkait lainnya, juga dukungan para stakeholder kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan rangka mendukung pencapaian visi dan misi BPPMHKP yang menyelenggarakan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya merealisasikan hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN ACEH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Diky Agung Setiawan**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Aceh

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Aceh

Diky Agung Setiawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN ACEH

		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	SASARAN KEGIATAN Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	70
		3.	Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Di Wilayah RI Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	70
		4.	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar	5.	Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	70
SK.3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Stasiun KIPM Aceh	6.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan UPT Stasiun KIPM Aceh (Indeks)	3,36
		7.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Indeks)	86
		8.	Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	75
		9.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	82
		10.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	71
		11.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (Nilai)	93,76
		12.	Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	100
		13.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	80
		14.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	80
		15.	Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup UPT Stasiun KIPM Aceh (%)	80

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.405.646.000
2.	Manajemen Mutu	374.000.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	367.000.000
Total Anggaran Stasiun KIPM Aceh Tahun 2024		5.146.646.000

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan



Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Aceh



Diky Agung Setiawan



**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH**

Jl. Raya Bandara Sultan Iskandar Muda, Blangbintang, Aceh Besar

☎ (0651) 8071386 📠 082181360808 ✉ bkipmaceh@kkp.go.id

LAMAN: www.kkp.go.id